

ABSTRAK

Widuri Novitasari (01656190004)

(xiv + 98 halaman)

Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris berkewajiban untuk menjaga rahasia kliennya dan juga notaris memiliki hak dan kewajiban ingkar terkait dengan jabatannya. Namun dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perusahaan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi yang mewajibkan Notaris untuk mengungkapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi, sehingga timbul permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni apakah keterbukaan informasi pemilik manfaat melanggar hak ingkar dan jabatan ingkar Notaris serta bagaimana perlindungan hukumnya. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data. Hasil penelitian, Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tidak melanggar hak ingkar notaris untuk pengungkapan Pemilik Manfaat dari Korporasi dimana Notaris berlaku sebagai pemegang kuasa dari Korporasi dan perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah perlindungan sebagai pemegang kuasa serta pelapor dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris.

Referensi : 42 (1986-2019)

Kata Kunci : Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) , Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris, Korporasi

ABSTRACT

Widuri Novitasari (01656190004)

(xiv + 98 pages)

As a public official, a Notary is obliged to keep the confidentiality of his client and also a Notary has the right and obligation to deny related to his position. However, with the Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principles of Recognizing the Beneficial Owner of the Company in the Context of Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and the Financing of Terrorism as well as the Regulation of the Minister of Law and Human Rights in 2019 concerning Procedures for Implementing the Implementation of the Principle of Recognizing the Owner Benefits of Corporations which require Notaries to disclose the Beneficial Owners of the Corporations, therefore there are two issues, whether the disclosure of information on the beneficial owners violates the right of denial and the position of the Notary, and how the legal protection for Notary as a public official. This research using normative juridical research with qualitative methods to analyze the data. The results of the research, the Notary in carrying out their position as a public official does not violate the right of the notary to disobey the disclosure of the Beneficial Owner of the Corporation where the Notary acts as the power holder of the Corporation and the legal protection that can be provided is protection as the holder of the power of attorney and the reporter in the Principle of Recognizing Notary Service Users.

Reference : 42 (1986-2019)

Keyword : Beneficial Ownership , The right to deny and the obligation to disobey of the notary, Corporation